

POLITIK PENGAKUAN KELOMPOK MUSISI UNTUK HAK CIPTA ATAS MUSIK

(STUDI KASUS: PERJUANGAN FEDERASI SERIKAT MUSISI INDONESIA)

RIFALDI CHANDRADINATA

ABSTRAK

Musisi sebagai pencipta karya sering kali mengalami ketidakadilan dalam bentuk pelanggaran hak cipta, baik secara moral maupun ekonomi, terutama di tengah dominasi industri musik digital. Kondisi tersebut mendorong perlunya perjuangan kolektif untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Salah satu organisasi yang aktif memperjuangkan hak-hak musisi adalah Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI). FESMI berperan sebagai ruang kolektif musisi dalam memperjuangkan pengakuan atas hak cipta musik melalui berbagai bentuk advokasi dan konsolidasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana FESMI memobilisasi sumber daya dalam memperjuangkan hak cipta atas musik sebagai bentuk politik pengakuan terhadap profesi musisi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teori Politik Pengakuan dari Axel Honneth dan teori Mobilisasi Sumber Daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FESMI mampu memobilisasi sumber daya, moral, kultural, organisasi, manusia dan material dalam memperkuat posisi tawar musisi, serta menciptakan solidaritas kolektif untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Kemampuan FESMI dalam mengorganisir musisi, membangun jaringan advokasi, serta memanfaatkan ruang publik menjadikannya aktor penting dalam perjuangan pengakuan hak cipta musik di Indonesia. Gerakan ini mencerminkan bahwa hak cipta bukan hanya soal perlindungan hukum, tetapi juga pengakuan sosial dan politik atas eksistensi musisi sebagai subjek sah dalam industri kreatif.

Kata Kunci: Politik Pengakuan, Hak Cipta, Musisi, FESMI, Mobilisasi Sumber Daya

**THE POLITICS OF RECOGNITION FOR MUSIK COPYRIGHT
(CASE STUDY OF Federasi Serikat Musisi Indonesia)**

RIFALDI CHANDRADINATA

ABSTRACT

Musicians as creators often experience injustice in the form of copyright violations, both morally and economically, especially amid the dominance of the digital music industry. This situation highlights the urgent need for collective efforts to gain legal recognition and protection. One of the organizations actively fighting for musicians' rights is the Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI). FESMI serves as a collective platform for musicians to advocate for copyright recognition through various forms of advocacy and organizational consolidation. This research aims to examine how FESMI mobilizes its resources in the struggle for music copyright as a form of recognition politics toward the musician profession in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The data were analyzed using Axel Honneth's Politics of Recognition theory and Resource Mobilization theory. The findings show that FESMI has succeeded in mobilizing moral, cultural, organizational, human, and material to strengthen musicians' bargaining power and build collective solidarity to push for fairer and more inclusive policy changes. FESMI ability to organize musicians, build advocacy networks, and utilize public space positions it as a key actors in the fight for music copyright recognition in Indonesia. This movement reflects that copyright is not only a matter of legal protection but also of social and political recognition of musicians as legitimate subjects in the creative industry.

Keywords: Politics of Recognition, Copyright, Musicians, FESMI, Resource Mobilization